

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang gencar-gencar dalam melakukan pembangunan baik tingkat daerah maupun skala nasional. Mulai dari pembangunan sarana publik seperti jalan raya di daerah-daerah, peningkatan pelayanan sektor kesehatan, memperkuat sektor militer, pembangunan sektor pendidikan dan tak terkecuali sektor penting dalam pembangunan ini adalah sektor ekonomi. Karena peningkatan angka pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi negara berkembang, sebab dari sana lah dapat terlihat seberapa besar dan pesatnya pertumbuhan sebuah negara. Sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Hal ini sejalan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Disinilah peran penting pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya baik alam atau manusia serta dana yang tersedia, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk menyejahterakan dan menaikkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Karena landasan utama dari pembangunan ekonomi adalah pemerataan distribusi pendapatan sesuai proporsi masing-masing, pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkesinambungan, stabilitas neraca pembayaran serta efisiensi disegala bidang.

Selain faktor sumber daya alam dan manusia, proses pembangunan juga membutuhkan faktor penunjang lain berupa sumber daya modal. Karna setiap pembangunan baik sekecil apa pun tentunya memerlukan dana, apalagi membangun ekonomi Indonesia yang penduduknya lebih kurang mencapai 250 juta jiwa. Ada pun sumber-sumber pendanaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Suparmoko, 1992 : 94) :

- a. Pendapatan pajak, adalah iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung.
- b. Retribusi, adalah pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dimana terdapat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembiayaan retribusi tersebut.
- c. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Sumber pendanaan dari luar negeri, adalah bantuan atau hibah yang diperoleh dari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA).

Dalam proses kegiatan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan menjejahterakan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, sektor pariwisata yang juga perlu mendapatkan perhatian dan perlu diupayakan oleh pemerintah. Dari sektor ini diharapkan juga dapat untuk mendorong peningkatan disektor ekonomi itu sendiri, sebab dari pengembangan sektor pariwisata ini dapat berperan sebagai penerimaan pajak dan retribusi daerah, sebagai lahan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, dan devisa negara dari turis asing yang datang ke Indonesia. Tercatat pada tahun 2010 devisa dari pariwisata Indonesia

memperoleh pemasukan Rp7.603,45 triliun meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang memperoleh pemasukan Rp6.298,02 triliun (Sindo News, 2011)

Pada tahun 2006 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) RI menobatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai satu-satunya daerah tujuan wisata utama nasional di wilayah Sumatera, atas dasar bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi dan daya tarik bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang sangat luar biasa. Penilaian yang dilakukan Depbudpar pada saat itu antara lain melihat data terakhir arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatera Barat yang menunjukkan peningkatan cukup tinggi. Data itu adalah pada bulan Mei 2006 arus wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat mencapai 1.874 orang dan naik 16,17% pada Juli 2007 yakni menjadi sebanyak 2.177 orang. Dengan melihat persentase tersebut, pemerintah optimis sektor pariwisata Sumatera Barat mampu menjadi andalan dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata nasional terhadap pendapatan dalam negeri mengingat besarnya potensi daerah ini (Merdeka.com).

Maka dari itu pemerintah pusat memberi keleluasaan untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dari daerahnya itu sendiri sebagai mana yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan otonomi daerah ini dimaksudkan untuk mengerucutkan tanggung jawab pemerintah pusat untuk memberikan wewenang ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar dapat mengelola keuangannya untuk pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dari otonomi daerah ini, Kabupaten Tanah Datar pun sadar akan visi dan misi pembangunan nasional dan daerah. Ini merupakan harapan sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi Kabupaten Tanah Datar pernah dinobatkan sebagai salah satu dari empat Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan otonomi daerah oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Terlihat pada tahun 2000-2004 keberhasilan dari segi sistem pelayanan publiknya yang optimal hingga dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang hampir mencapai 1000%, dimana pada tahun 2000 sebesar 1,7 miliar rupiah menjadi 15 miliar rupiah pada tahun 2004.

Pemerintah pun menyadari sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu memberikan sumbangsih terhadap perekonomian yang cukup berarti. Melihat sumber daya yang terdapat di Kabupaten tanah datar ini pemerintah pun optimis untuk dapat mengembangkan pariwisatanya sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Selain itu industri ini juga dapat mendorong untuk mengembangkan usaha-usaha rakyat lainnya, yang mana nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan melihat potensi yang tersedia Kabupaten Tanah Datar sangat layak untuk dijadikan tujuan wisata, alam yang masih alami, budaya serta adat istiadat yang masih sangat kental dan terjaga dimasyarakat ditunjang dengan peninggalan-peninggalan budaya pada jaman dahulu menjadi sektor-sektor unggulan untuk dijadikan objek wisata yang dapat menarik minat wisatawan terlihat dari data jumlah pengunjung tempat wisata di Kabupaten Tanah Datar yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2013 sebanyak

335.217 wisatawan dan 926.300 pada tahun 2014 (Disbuparpora Tanah Datar, 2015).

Untuk mengimbangi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar ini, pemerintah juga menyediakan akomodasi penginapan atau hotel untuk menunjang pelayanan kegiatan pariwisata. Penyediaan akomodasi penginapan ini diupayakan untuk terus bertambah, terlihat pada tahun 2011 jumlah hotel di Tanah Datar berjumlah 8 buah, pada tahun 2012 meningkat menjadi 10 hotel pada 2013-2014 sudah bertambah menjadi 12 hotel. Dengan keberadaan akomodasi penginapan ini juga akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah dari pajak dan retribusi yang dibayarkan ke pemerintah daerah.

Selain itu pemerintah daerah juga mengupayakan untuk pelayanan pada sektor sarana angkutan umum untuk menunjang pelayanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar. Dalam aktivitas pariwisata, untuk dapat menikmati wahana-wahana wisata para wisatawan harus datang ke daerah obyek wisata. Dengan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai suatu lokasi objek wisata ketersediaan sarana dan prasarana transportasi ke daerah wisata merupakan hal yang sangat penting, karna akan berpengaruh kepada jumlah kedatangan wisatawan yang pas akhirnya akan mampu meningkatkan perekonomian wilayah

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka melaksanakan pembangunan, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, yang di dipengaruhi oleh faktor seberapa besar jumlah kunjungan wisata yang datang ke daerah tersebut,

akomodasi yang tersedia seperti Hotel dan rumah restoran serta pelayanan sarana angkutan umum yang dapat mempermudah akses ke lokasi wisata akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran/tempat makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016?
3. Bagaimana pengaruh jumlah sarana angkutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016.

2. Menganalisis pengaruh jumlah hotel dan restoran/rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016.
3. Menganalisis pengaruh jumlah sarana angkutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan evaluasi atau menetapkan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata tersebut.
3. Bagi kalangan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana informasi dan pengetahuan terhadap perkembangan pendapatan sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Datar.
4. Bagi penulis, penelitian ini adalah sebagai sarana menambah wawasan dan penerapan pengetahuan terhadap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam kegiatan menulis.
5. Bagi sesama peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan atau bahan dukungan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa akan datang yang lebih mendalam dan luas ruang lingkungannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada seberapa besar kontribusi dari faktor-faktor sektor pariwisata seperti Jumlah Kunjungan Wisatawan, Akomodasi Hotel dan Restoran serta Sarana Angkutan Umum terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2016.
2. Serta data yang digunakan adalah data *sekunder* pada rentang waktu tahun 2010-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 6 BAB, setiap BAB akan dibagi ke dalam sub bab yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang akan diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai pengertian pariwisata, wisatawan, pembangunan sektor pariwisata, pendapatan asli daerah, akomodasi hotel dan restoran/tempat makan, sarana angkutan umum.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdapat jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode penelitian untuk mencari hasil dari penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran bagai mana lokasi tempat yang di teliti, baik berupa topografi, iklim, demografi, serta kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dari hipotesis-hipotesis terhadap masalah yang diuji.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini bersisi inti sari dari pembahasan dan penelitian, serta saran atau masukan bagi peneliti untuk lebih baik lagi kedepannya.

